

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Pada saat ini, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Menurut data RENSTRA KEMENTAN (2015) dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010- 2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10.26 % dengan pertumbuhan sekitar 3.90 %. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30.2 % dari total tenaga kerja. Investasi disektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4.2 % dan 18.6% per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4.2 % per tahun.

Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7.4 % dan pertumbuhan impor 13.1 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian dalam arti sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5.64 % dan 6.20 % per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3.69 % per tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dari pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian. Selain itu, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya yang sangat mendasar, diantaranya adalah kurangnya permodalan bagi petani dan pelaku usaha pertanian (Ashari, 2009). Oleh sebab itu, pembiayaan pertanian merupakan salah satu isu penting dalam pertanian dan perlu untuk diperhatikan dengan cara pemanfaatan dan distribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kemakmuran pertanian serta

meningkatkan pendapatan petani (Hosseini-Yekani, 2011 dalam Ansari et al., 2011).

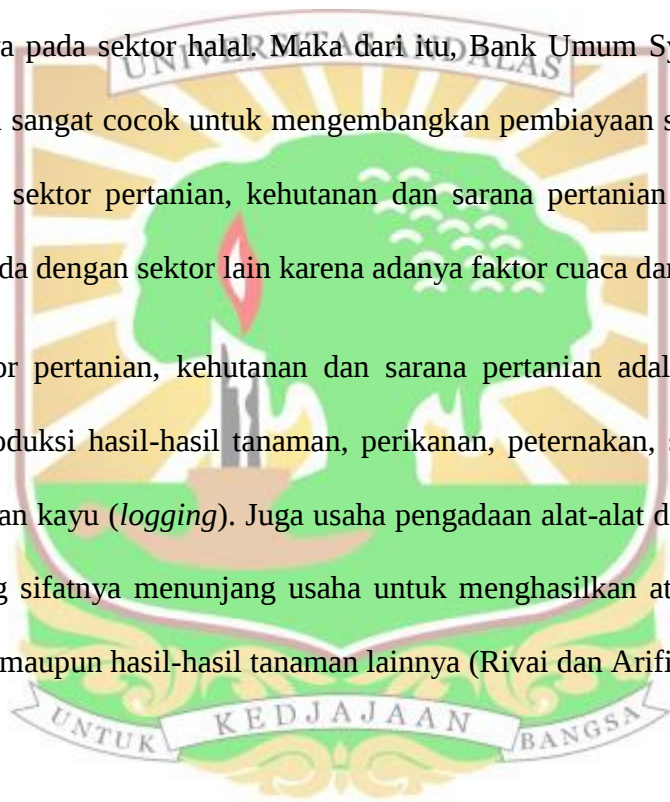
Perbankan syariah, memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal dan formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Kebutuhan modal diperkirakan akan semakin meningkat dimasa datang, seiring dengan semakin melonjaknya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan, maupun upah tenaga kerja. Dengan kecenderungan seperti ini, maka peran lembaga keuangan seharusnya akan signifikan. Karena pembiayaan sektor pertanian dari anggaran pemerintah, sangatlah tidak memadai mengingat semakin besar beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah untuk pembiayaan pembangunan keseluruhan sektor.

Kontribusi pembiayaan perbankan terhadap sektor pertanian masih sangat rendah meskipun bidang tersebut sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Tingginya persepsi risiko menjadi penyebab rendahnya ekspansi pembiayaan pada sektor pertanian. Kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu : (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kredit bermasalah sewaktu mengucurkan pembiayaan pertanian. (2) aturan BI yang cukup ketat agar bank *prudent* (kehati-hatian) dalam penyaluran dana, serta (3) banyak bank khususnya bank besar yang tidak memiliki pengalaman menyalurkan pembiayaan mikro (Indiastuti, 2005).

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariat Islam. Hal ini di dasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut atau memberi pinjaman dengan bunga,

serta larangan berinvestasi di sektor-sektor haram (miras, judi, dll), dimana yang dalam perbankan konvensional hal ini diperbolehkan. Bank syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (bunga). Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara *fixed rate* dari awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang di investasikan untuk semua sektor. Adapun bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor halal. Maka dari itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sangat cocok untuk mengembangkan pembiayaan sektor riil, salah satunya untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian yang memiliki karakter berbeda dengan sektor lain karena adanya faktor cuaca dan musim tanam.

Sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian adalah usaha-usaha untuk memproduksi hasil-hasil tanaman, perikanan, peternakan, serta kehutanan dan pematangan kayu (*logging*). Juga usaha pengadaan alat-alat dan fasilitas bagi pertanian yang sifatnya menunjang usaha untuk menghasilkan atau menampung bahan pangan maupun hasil-hasil tanaman lainnya (Rivai dan Arifin 2010).



**Tabel 1.2 : Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah).**

Sektor Ekonomi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Pertumbuhan(%)
Pertanian, Kehutanan Dan Sarana Pertanian	1.331	1.762	2.201	2.809	3.165	5.674	7.228	3.76
Pertambangan	1.047	1.120	1.733	2.094	3.018	4.597	5.177	2.63
Perindustrian	1.579	2.337	4.077	5.008	6.029	13.300	14.888	8.48
Listrik, Gas Dan Air	698	1.354	2.381	3.159	4.663	5.492	5.828	3.27
Konstruksi	3.516	4.194	5.858	7.142	8.086	11.669	11.591	5.14
Perdagangan, Restoran, Dan Hotel	5.000	7.609	9.778	12.624	14.314	24.287	26.810	13.89
Pengangkutan, Pergudangan Dan Komunikasi	3.349	3.696	3.369	4.321	5.387	12.192	13.967	6.76
Jasa Dunia Usaha	13.664	20.233	25.63	37.150	47.598	66.810	70.270	36.05
Jasa Sosial/Masyarakat	2.661	2.975	4.464	7.878	12.085	11.022	11.076	5.36
Lain-Lain	14.042	22.902	43.164	65.319	79.778	44.282	37.060	14.67

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015)

*Juni

Berdasarkan data diatas, sektor yang paling banyak dibiayai adalah sektor jasa dunia usaha disusul oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel, kemudian sektor perindustrian. Sedangkan sektor yang sedikit dibiayai adalah sektor pertambangan, listrik, gas dan air serta sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian. Hal yang menarik adalah Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang sangat subur, namun sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian berada dalam urutan ke tujuh dari sembilan sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan sebesar 3.76% per tahunnya. Padahal jika dilihat potensinya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi pada produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri,

sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Ashari, 2009), namun kendalanya terdapat pada lemahnya permodalan (Ashari dan Saptana, 2005). Berdasarkan data OJK (2015) total penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian hanya berkisaran sebesar 3 % dari seluruh total pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, nilai maksimal yang disalurkan untuk pembiayaan sektor ini hanya 10 % dari keseluruhan total pembiayaan.

Kebijakan penyaluran dana untuk kegiatan pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian ini dipengaruhi oleh dua indikator yaitu indikator internal perbankan dan indikator eksternal perbankan. Indikator internal perbankan antara lain berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan perusahaan perbankan seperti laba yang diperoleh (ROA), batas aman pemberian pembiayaan (FDR), jumlah dana pihak ketiga (DPK), *equivalent rate* pembiayaan (ERP), dan *equivalent rate* DPK (ERDPK). Sedangkan indikator eksternal perbankan berkaitan dengan kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian seperti suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan bonus sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) serta suku bunga kredit (SBK) bank konvensional yang merupakan faktor eksternal dari perbankan syariah.

Return on Assets merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut Qolby (2013) jika *Return on Assets* (ROA) suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Semakin besar tingkat

keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

Financing Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio keuangan yang mengukur likuiditas bank. FDR adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Menurut Adzimatunur, Hartoyo dan Wiliasih (2014) hubungan FDR dengan pembiayaan sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi FDR menunjukkan semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga yang diterima.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut Kasmir (2002) dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.

Sebagai negara yang menganut sistem moneter ganda, Bank Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen moneter syariah yang berdampingan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang selama ini dipakai sebagai instrumen moneter konvensional. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah. Sedangkan SBI adalah surat berharga

atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sebagai instrumen moneter, SBI dan SBIS memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor riil dimana instrumen ini akan mempengaruhi besarnya pembiayaan dan penyaluran kredit pada sektor riil. (Ramadhan dan Beik, 2013).

Selain itu, indikator yang mempengaruhi pembiayaan perbankan lainnya adalah suku bunga kredit bank konvensional. Suku Bunga Kredit (SBK) digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Disaat suku bunga kredit perbankan konvensional mengalami kenaikan dari suku bunga sebelumnya, maka masyarakat akan mengalihkan perhatian dalam rangka mendapatkan dana, maka masyarakat akan memilih bank syariah sebagai alternatif mendapatkan modal. Dengan kata lain, jika suku bunga bank konvensional naik, maka jumlah pembiayaan juga akan naik di perbankan syariah (Suryadi, Priyasono dan Arsyianti (2015). Selain itu pendapat yang berbeda menurut penelitian (Nugroho, 2009 dalam Beik dan Aprianti, 2013), menyatakan bahwa hubungan antara kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan syariah adalah searah, sehingga turunnya permintaan kredit konvensional akan menurunkan permintaan pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul” **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel Indikator Internal Perbankan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap Pembiayaan Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh variabel Indikator Eksternal Perbankan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap Pembiayaan Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia ?
3. Apakah kebijakan yang dapat diambil dalam upaya peningkatan pembiayaan yang disalurkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh variabel Indikator Internal dalam jangka pendek dan jangka panjang Perbankan terhadap Pembiayaan Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh variabel Indikator Eksternal Perbankan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap Pembiayaan Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia.
3. Merekomendasikan kebijakan yang dapat diambil dalam upaya peningkatan pembiayaan yang disalurkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan peneliti dalam hal apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia
2. Bagi peneliti dan akademis diharapkan sebagai pengembangan wawasan dan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi pemerintah dan perbankan syariah berguna untuk mengambil kebijakan dalam upaya peningkatan pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BUS dan UUS di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel Indikator Internal Perbankan dan variabel Indikator Eksternal Perbankan terhadap Pembiayaan Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama 6 tahun yang berbentuk data bulanan dalam kurun waktu 2010-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (SPSBI), Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1.2 : Variabel Indikator Internal Perbankan dan Variabel Indikator Eksternal Perbankan

No	Indikator Internal Perbankan	No	Indikator Eksternal Perbankan
1	<i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR)	1	Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2	<i>Return On Assets</i> (ROA)	2	Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3	Jumlah Dana PihakKetiga (DPK)	3	Suku Bunga Kredit (SBK)
4	<i>Equivalent Rate</i> Pembiayaan (ERP)		
5	<i>Equivalent Rate</i> Dana PihakKetiga (ERDPK)		

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab dengan sistematika sebagai berikut ini :

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, hubungan variabel dependen dengan independen, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup dalam penelitian. Jenis Penelitian, Data dan sumber data, definisi operasional variabel, serta model yang atau metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Gambaran Umum

Bab ini memaparkan bagaimana perkembangan setiap variabel yang terdapat dalam model pada beberapa waktu terakhir.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil uji statistik berdasarkan model dan metode yang digunakan dalam penelitian, serta menjelaskan hasil yang telah diperoleh peneliti setelah dilakukan pengolahan data yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi.

